



ANALISIS *GOVERNANCE NETWORKING* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN *STUNTING* DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Yoakim Rembu^{1*)}, Pionisius Minggu², Yohanes Fritantus³, Hendrikus Hironimus Botha⁴, Marthen Patiung⁵

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Nusa Tenggara Timur,
Indonesia
s2yoakimrembu@gmail.com

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Nusa Tenggara Timur,
Indonesia
s2pionisiusminggu@gmail.com

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Nusa Tenggara Timur,
Indonesia
yfritantus@gmail.com

⁴Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Nusa Tenggara Timur,
Indonesia
hendrbotha@gmail.com

⁵Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Nusa Tenggara Timur,
Indonesia
marthenpatiung62@gmail.com

ABSTRAK

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat penurunan angka *Stunting*. Namun dalam implementasinya masih menemui berbagai hambatan yang berdampak pada masih tingginya prevalensi kejadian *Stunting* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Governance Networking* dalam implementasi kebijakan penanganan *Stunting* di kabupaten Timor Tengah Utara, dimana Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang anak *Stunting* tertinggi kedua setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan yang menjadi instrumen adalah peneliti dimana peneliti tidak hanya melakukan wawancara, akan tetapi peneliti juga melakukan interaksi di lapangan berupa pengamatan terhadap proses penanganan *Stunting*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *social network theory* (Klijn & Kopenjan) yang melihat struktur dalam jaringan implementasi kebijakannya yakni aspek kontak, kepercayaan, sharing informasi, pertukaran sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan perhatian yang besar dalam Upaya penanganan *Stunting* dimana pada aspek kontak melibatkan berbagai stakeholder baik pihak pemerintah, swasta maupun akademisi dengan peran dan tugasnya masing-masing. Pada aspek kepercayaan, setiap actor yang terlibat mampu memberikan jaminan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peran masing-masing. Aspek sharing informasi terlaksana melalui terbentuknya tim percepatan penurunan *Stunting*, sedangkan aspek pertukaran sumber daya ditandai dengan adanya kolaborasi sumber daya yang terlibat dalam Tim Percepatan Penanganan *Stunting* dengan berbagai perannya masing-masing. Upaya menurunkan angka



Stunting perlu ditetapkan melalui kebijakan yang lebih spesifik dengan berfokus pada terobosan yang berdampak langsung pada perubahan perilaku masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Kata Kunci: *Governance Networking*, Kebijakan, *Stunting*

ABSTRACT

Stunting is a condition where a person's height is shorter than the height of other people in general (of the same age). The government has issued various policies to accelerate the reduction in Stunting rates. However, in its implementation, it still encounters various obstacles that have an impact on the still high prevalence of Stunting in Indonesia. This study aims to analyze Governance Networking in the implementation of Stunting management policies in North Central Timor Regency, where North Central Timor Regency is one of the regencies that contributes the second highest number of stunted children after South Central Timor Regency in the province of East Nusa Tenggara. This study uses a qualitative approach, and the instrument is the researcher where the researcher not only conducts interviews, but the researcher also interacts in the field in the form of observations of the Stunting management process. This study uses a social network theory analysis approach (Klijn & Kopenjan) which looks at the structure of the policy implementation network, namely aspects of contact, trust, information sharing, and resource exchange. The results of the study show that the North Central Timor Regency government pays great attention to efforts to handle Stunting where the contact aspect involves various stakeholders, both government, private and academic parties with their respective roles and duties. In terms of trust, each actor involved is able to provide assurance to carry out tasks and functions according to their respective roles. The aspect of information sharing is implemented through the formation of a Stunting reduction acceleration team, while the aspect of resource exchange is marked by the collaboration of resources involved in the Stunting Handling Acceleration Team with their respective roles. Efforts to reduce Stunting rates need to be determined through more specific policies by focusing on breakthroughs that have a direct impact on changing the behavior of the community as the target group.

Keywords: *Governance Networking, Policy, Stunting*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara besar tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan yang mengharuskan pemerintah untuk berkolaborasi dengan pihak lain dalam mengatasinya. Kemiskinan merupakan satu dari sekian banyak masalah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk segera diatasi. Masalah kemiskinan seakan menjadi induk dari lahirnya permasalahan-permasalahan lain yang pada akhirnya akan berimbas pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bangsa. Salah satu masalah yang timbul sebagai akibat dari kemiskinan adalah *Stunting*. *Stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini termasuk di Indonesia. *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 (dua) tahun, di mana keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak. Ketersediaan dan kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan serta menciptakan kualitas sumber daya manusia, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembanguna suatu bangsa. Gizi memiliki pengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja sumber daya manusia (Almatsier dalam Rahayu dkk, 2018). Saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu dampak masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia adalah *Stunting*.



Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). Menurut *World Organization Health* (WHO) *Stunting* adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada Panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur. Di Indonesia, *Stunting* merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi (Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia, 2018). Bila masalah ini bersifat kronis, maka akan memengaruhi fungsi kognitif yakni tingkat kecerdasan yang rendah dan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia. Masalah *Stunting* memiliki dampak yang cukup serius; antara lain, jangka pendek terkait dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi/balita, jangka menengah terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumberdaya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa (Aryastami dalam Saputri, 2019). *Stunting* disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *Stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1000 Hari Pertama kehidupan (HPK) dari anak balita. Beberapa faktor yang menjadi penyebab *Stunting* adalah (Saputri, 2019): (1). Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. (2). Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-*Ante Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) *Post Natal Care* dan pembelajaran dini yang berkualitas. (3). Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. (4). Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi *Stunting* yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami *Stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2021 dengan mengumpulkan data di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan jumlah blok sensus (BS) sebanyak 14.889 Blok Sensus (BS) dan 153.228 balita angka *Stunting* secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik (Kemenkes RI, 2021). Pada akhirnya secara luas *Stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak diatasi dapat memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan (Saputri 2019).

Kerdil (*Stunting*) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan angka *Stunting* tertinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 37,8% atau 1 dari 3 anak balita di NTT mengalami *Stunting*. Berikut data Provinsi dengan angka *Stunting* tertinggi pada tahun 2021.

Tabel 1. Provinsi Dengan Angka *Stunting* Tertinggi

No	Provinsi	Porsentase (%)
1.	Nusa Tenggara Timur	37,8 %
2.	Sulawesi Barat	33,8%
3.	Aceh	33,2%
4.	Nusa Tenggara Barat	31,4%
5.	Sulawesi Tenggara	30,2%

Sumber: Berita *Online* Databoks, Diolah Peneliti 2023.

Sementara itu dari berita *online* dapat kita lihat bahwa pada tahun 2022 pada tahun 2022 angka *Stunting* di NTT masih cukup tinggi dimana tercatat per Agustus 2022 mencapai sebanyak 77.000 lebih orang. Dari jumlah tersebut yang berusia di bawah dua tahun sebanyak 19.291 orang anak (Sumber: Berita *Online* Antara News, 23 November 2022). Upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* harus terus dilakukan melalui Tindakan-tindakan nyata seperti pemberian makanan pendamping air susuh ibu (ASI), pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil. Selain itu pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis, PMT bagi bayi gizi kurang, penimbangan rutin dan sebagainya. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021 termasuk dalam 15 kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkategori merah dalam kasus *Stunting*. Penyetoran status merah ini dikarenakan tingkat prevalensi *Stunting*nya masih diatas 30%. 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Kabupaten Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah. Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berprevalensi *Stunting* antara 10 hingga 20 persen (Sumber: Berita *Online* Kompas. Com 3 Maret 2022).

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menempati posisis tertinggi kedua setelah kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Upaya-upaya dalam menekan angka *Stunting* harus dilakukan secara konsisten baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pada tataran paling bawah yakni pemerintah desa. Keterlibatan Lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya juga sangat diperlukan dalam rangka menekan angka *Stunting*. Dibutuhkan Langkah-langkah strategis serta intervensi nyata sehingga mampu memberikan pengaruh secara signifikan dalam penanganan masalah *Stunting* di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka *Stunting* adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam Peraturan Presiden ini mengatur strategi nasional percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia dengan tujuan; menurunkan prevalensi *Stunting*; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi; memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Kelompok yang menjadi sasaran meliputi; remaja; calon pengantin; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menurunkan prevalensi *Stunting* terus ditingkatkan dengan berbagai upaya pendekatan. Upaya-upaya penanganan prevalensi *Stunting* tersebut menunjukkan hasil yang positif dimana prevalensi *Stunting* di Kabupaten TTU terus



menunjukkan penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Prevalensi *Stunting* di Kabupaten TTU pada tahun 2021 adalah sebesar 25,3%, namun pada Bulan Operasi Timbang, Bulan Februari 2022 terjadi perubahan prevalensi *Stunting* yakni naik menjadi 31,6% (6.428 balita) atau naik sebesar 6,3% (Laporan hasil pemantauan status gizi TTU). Terhadap perkembangan keadaan tersebut, dilakukan upaya intervensi yang dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Intervensi Jangka Pendek dilakukan melalui suatu gerakan yaitu Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS). Aksi GEMAS ini melibatkan berbagai stakeholders baik Pemerintah maupun Swasta untuk melakukan intervensi dengan sistem “Bapak Angkat”. Intervensi Jangka Panjang dilakukan melalui upaya perbaikan sistem penanganan *Stunting* terintegrasi yakni Aksi Konvergensi *Stunting* yang terdiri dari 8 (Delapan) Aksi yang meliputi; Analisis Situasi, Rencana Kerja, Rembuk *Stunting*, Penyusunan Regulasi, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Data, serta Monitoring dan Evaluasi.

Implementasi kebijakan publik mengandung suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang akan dicapai merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau eksekutif (Almasyah dkk, 2021). Proses implementasi berbagai kebijakan dalam rangka menekan angka *Stunting* tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Adanya virus corona membuat seluruh stakeholder fokus pada pencegahan bahaya dan dampaknya. Akibatnya urusan kesehatan yang lebih esensial dan bersifat jangka panjang seperti halnya permasalahan *Stunting* cenderung terabaikan. Masalah *Stunting* merupakan masalah jangka panjang yang sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia dan tidak boleh diabaikan. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung dan sebagainya. Keterlibatan berbagai unsur baik pemerintah maupun pihak swasta dalam menangani masalah *Stunting* juga perlu diatur secara baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya. Konsep ***Governance Networking Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara akan diperjelas pada pembahasan artikel ini.*** Dimana dalam penelitian ini menggambarkan proses kompleksitas dalam pelaksanaan jaringan kebijakan penanganan *Stunting* di Kabupaten Timor Tengah Utara dan menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi jaringan dapat dilihat dari struktur dalam *governance network* tersebut.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Bogdan dan Biklen, S, 1992 dalam (Fathonah, Kholilatusyahidah, & Anggraini, 2019) disebutkan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Hasil dari pendekatan kualitatif akan diuraikan secara deskriptif, yang menurut (Nazir, 2003) diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Sutardi, 2020). Fokus dalam Penelitian terdiri atas (a) Kontak (*Contact*) (b) Kepercayaan (*Trust*) (c) Berbagi Informasi (*Sharing Information*) dan (d) Pertukaran Sumberdaya (*Resourcesne exchange*). Informan dalam penelitian ini yakni (1) Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Timor Tengah Utara, (2) Kepala Unit Pelayanan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten timor Tengah Utara, (3) Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Kabupaten Timor Tengah Utara dan (4) Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan pemerintahan (*Governance Network*) adalah hubungan interdependensi para aktor yang memiliki kewenangan (*autonomy*) pada sektor publik, privat, dan sosial yang berkerja bersama dalam pencapaian tujuan dari organisasi jaringan. Jaringan (*networks*) adalah sebuah instrument menaggabungkan beberapa aktor untuk bekerja bersama dan beinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Kickert, Klijn, dan Kopenjan, 1997; Koiman 1993; Rhodes 1997) dalam Klijn & Koppenjan (2016:22). Struktur dalam Analisis *Governance Networking* penanganan *Stunting* di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menggunakan pendekatan *Social Network Theory* yang menjelaskan tentang adanya struktur dan relasi serta koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan jaringan kebijakan publik yang kompleks. Struktur dalam jaringan kebijakan dimaksudkan untuk melihat posisi aktor dalam pelaksanaan jaringan kebijakan dimana menurut Klijn & Koppenjan dalam Rukmana (2020) yang mencakup empat bagian yakni kontak (*contact*), kepercayaan (*trust*), berbagi informasi (*sharing information*) dan pertukaran sumber daya (*resource exchange*). Terhadap permasalahan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berkomitmen untuk menurunkan prevalensi *Stunting* terus ditingkatkan dengan berbagai upaya pendekatan. Upaya-upaya penanganan prevalensi *Stunting* tersebut diharapkan mampu menunjukkan hasil yang positif. Tingginya angka anak *Stunting* mendorong pemerintah daerah untuk membangun jaringan Kerjasama baik dalam lintas dinas maupun dengan pihak swasta demi menekan angka *Stunting* di TTU. Adapun Upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menurunkan angka *Stunting* yakni dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: 179/KEP/HK/IV/2022. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam upaya penanganan *Stunting*, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menerapkan berbagai inovasi salah satunya melalui intervensi jangka pendek yang dilakukan melalui suatu Gerakan yakni Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS). Aksi GEMAS ini melibatkan berbagai stakeholders baik Pemerintah maupun Swasta untuk melakukan intervensi dengan sistem “Bapak Angkat”. Kolaborasi dari satu atau dua pihak/instansi menangani 1 Kecamatan. Aksi GEMAS ini melibatkan berbagai stakeholders baik Pemerintah, pihak Swasta, Perguruan Tinggi dan Kelompok Sasaran itu sendiri sebagai kelompok sasaran.

Gambar 1. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dalam Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS) Kabupaten TTU



Sumber: Diolah Peneliti, 2023



Struktur dalam jaringan implementasi kebijakan penanganan *Stunting* adalah pola hubungan antara aktor dalam jaringan yang mempengaruhi pola perilaku aktor dan juga menjadi ciri dari organisasi jaringan tersebut. Organisasi jaringan dalam penanganan *Stunting* di Kabupaten Timor Tengah Utara melibatkan actor yang berbeda yakni Lembaga pemerintah yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian yang berkordinasi dengan lembaga non pemerintahan atau pihak swasta, Perguruan Tinggi serta Kelompok sasaran itu sendiri. Adapun bentuk intervensi Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS) dalam usaha menurunkan angka *Stunting* di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi 5 (lima) pilar, yakni (a) Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), (b) Demo Memasak, (c) Pemberiaan PMT, (d) Pemeriksaan dan Pemberian Obat Cacing dan (e) Penanganan Penyakit Kronis. Intervensi Jangka Panjang dilakukan melalui upaya perbaikan sistem penanganan *Stunting* terintegrasi yakni Aksi Konvergensi *Stunting* yang terdiri dari 8 (Delapan) Aksi, yakni; (a) Analisis Situasi, (b) Rencana Kerja, (c) Rembuk *Stunting*, (d) Penyusunan Regulasi, (e) Pembinaan KPM, (f) Manajemen Data, (g) Pengukuran dan Publikasi Data, (h) Monitoring dan Evaluasi. Klijn & Koppenjan dalam Rukmana (2020) menjelaskan bahwa terdapat empat struktur dalam jaringan implementasi kebijakan yakni kontak (*contact*), kepercayaan (*trust*), berbagi informasi (*sharing information*) dan pertukaran sumber daya (*resource exchange*).

Kontak (*contact*)

Model Jejaring Kebijakan bukan hanya menuntut peran serta atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan juga hubungan saling menguntungkan di antara partisipan atau aktor dalam kerangka *good governance* (Mariane dkk, 2022). Upaya penanganan *Stunting* di Kabupaten Timor Tengah Utara terlihat adanya kolaborasi lintas sectoral baik pihak pemerintah, pihak swasta maupun akademisi dan menunjukkan adanya keeratan hubungan yang dimiliki oleh masing-masing actor dalam implementasi kebijakan penanganan *Stunting*. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk melihat frekuensi kontak yakni kontribusi berkaitan dengan apa yang aktor berikan kepada organisasi jaringan untuk mencapai tujuan, durasi berkaitan dengan intensitas pertemanan yang dapat dilihat dari interaksi sebelum dan setelah tergabung dalam organisasi jaringan dan utilitas organisasi jaringan yang berkaitan dengan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran dalam pelaksanaan program oleh aktor penyelenggara baik itu penyelenggara pemerintah maupun penyelenggara non pemerintah.

a) Sub Dimensi Kontribusi

Usaha menurunkan angka *Stunting* di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan tugas dan tanggungjawab Bersama baik pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Upaya menurunkan angka *Stunting*, baik pemerintah, pihak swasta maupun Perguruan Tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah melalui dinas-dinas yang terlibat telah memberikan kontribusi dalam hal penyedia sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana maupun biaya. Selain itu, pihak swasta juga memiliki peran yang sama dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan Perguruan Tinggi memiliki kontribusi melalui kegiatan penelitian (riset) dengan focus permasalahan *Stunting* dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan tema-tema penanganan *Stunting* dan melibatkan kelompok sasaran untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Hasil riset yang dilakukan oleh akademisi mampu memberikan informasi kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* berupa data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.



Secara umum Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki komposisi sebagai berikut.

Tabel 2. Komposisi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Aktor	Peran
a)	Bupati TTU	Pengarah
b)	Wakil Bupati TTU	Ketua
c)	Sekda & Bappelitbangda TTU	Wakil Ketua
d)	B2KB	Sekretaris
e)	Dinkes TTU	Kordinator bidang Intervensi spesifik
f)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kab TTU	Kordinator Bidang Intervensi Sensitif
g)	Asisten Tata Praja Setda TTU	Kordinator Bidang Komunikasi, Perubahan Perilaku dan pendampingan keluarga
h)	Bapelitbangda TTU	Kordinator bidang Koordinasi dan Konvergensi
i)	Rektor Unimor	Kordinator bidang data, monev dan manajemen Ilmu Pengetahuan
j)	P2KB	Sekretariat

Sumber: Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) TTU, diolah Peneliti, 2023

Permasalahan *Stunting* merupakan permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan multi actor untuk turut terlibat dalam penanganannya. Jones (Rukmana, 2020) menjelaskan bahwa aktor Sebagai penentu kebijakan perlu memahami permasalahan dan kebutuhan publik, karena tujuan utama kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan publik.

b) Sub dimensi Durasi

Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS) yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya sudah saling mengenal. Dalam sub dimensi durasi dapat diukur berdasarkan interkasi yang dilakukan baik oleh Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah maupun oleh organisasi berbasis komunitas. Interaksi yang dilakukan dapat berlangsung baik secara formal maupun informal. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Kabupaten TTU durasi pertemuan sangat tinggi dimana pertemuannya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali bahkan lebih secara tatap muka (langsung) dalam satu tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan tim. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah Aksi Konvergensi *Stunting* dalam Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS).

Berkaitan dengan waktu pertemuan dilaksanakan setiap satu bulan sekali dan melibatkan semua unsur dalam Tim Percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertemuan ini tidak hanya melibatkan unsur pemerintah, namun melibatkan sektor swasta dan kelompok sasaran. Dimensi ini dilakukan untuk memberikan masukan, pertukaran atau sharing informasi dan melaksanakan evaluasi terhadap berbagai intervensi yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

c) Sub Dimensi Utilitas

Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS) merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka menurunkan angka *Stunting*. Kehadiran para aktor yang



tergabung dalam GEMAS diyakini mampu memberikan dampak dalam upaya menurunkan angka *Stunting* di TTU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi aktor baik pemerintah, pihak swasta dan kaum akademisi, mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka *Stunting*. Hal ini terlihat dari berbagai intervensi yang dilakukan sehingga mampu menekan angka *Stunting* di TTU yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) TTU. Dampak kolaborasi aktor terhadap penurunan angka *Stunting* di TTU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Presentase Balita *Stunting* di Kabupaten TTU dalam 4 tahun terakhir

No	Tahun	Total Balita diukur	Status Gizi				Total Balita <i>Stunting</i>	%
			Sangat pendek	Pendek	Normal	Tinggi		
1.	2020	20173	1380	4456	14322	15	5836	28,9
2.	2021	20534	1212	3992	15318	12	5204	25,3
3.	2022	21632	1239	4041	16339	13	5280	24,41
4.	2023	20880	1409	3146	15587	6	4555	22,6

Sumber: Dinkes TTU, diolah peneliti 2023

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir kolaborasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Timor Tengah Utara mampu menurunkan angka *Stunting* dari 28,9 % pada tahun 2020 menjadi 25,3 % pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 angka *Stunting* di TTU berhasil ditekan menjadi 24,41% dan pada tahun 2023 turun menjadi 22,6%. Secara statistik tren angka *Stunting* di Kabupate Timor Tengah Utara dalam 4 (empat) tahun terakhir menurun.

Kepercayaan (*trust*)

Dimensi *Trust* dalam penelitian ini akan mengkaji kepercayaan dalam struktur organisasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) melalui Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS) diukur dari kepercayaan masing masing aktor pada perjanjian/ kontrak, manfaat kekuatan dan reliabilitas aktor dalam pelaksanaan program kebijakan menurunkan angka *Stunting*. Berikut ini beberapa indikator *trust* yang terjadi di Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS) Kabupaten Timor Tengah Utara.

a) *Kepercayaan dalam perjanjian kontrak (agreement trust)*

Kepercayaan dalam perjanjian kontrak (*agreement trust*) penting untuk menjamin ketercapaian program. *agreement trust* sebagai bentuk kesepakatan awal yang disepakati oleh masing masing aktor, dalam pembagian peran dari masing-masing dinas sebagai anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Penunjukan *leading sektor* ini dilakukan oleh Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Pengarah.

Komitmen para aktor dalam Upaya penurunan angka *Stunting* di TTU menjadi penting karena masing-masing aktor memiliki peran dan fungsi tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepercayaan lintas sektor terhadap perjanjian kontrak sehingga baik pemerintah, organisasi non pemerintah maupun Akademisi maksimal dalam menjalankan perannya.

Berdasarkan hasil penelitian, Aktor yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) mampu memberikan jaminan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peran masing-masing. Keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan intervensi percepatan penurunan *Stunting* menjadi bukti komitmen mereka. Selain itu, aktor juga terlibat secara aktif dalam setiap pertemuan sesuai agenda yang terjadwal untuk memberikan masukan dan saran Tindakan perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini tentu menjadi nilai tersendiri bagi bagi tim dalam membangun rasa percaya antara satu actor dengan yang lainnya.

b) Manfaat kekuatiran

Manfaat kekuatiran (*the benefit of the doubts*) dimaknai bahwa para aktor dalam organisasi jaringan saling memperingatkan akan adanya kekwatiran ketidakberhasilan program. Dalam usaha menurunkan angka *Stunting* di TTU, ketidakberhasilan merupakan salah satu hal yang menjadi kekuatiran oleh aktor yang terlibat didalamnya. Ini merupakan bukti adanya kekuatiran pada setiap actor yang terlibat dalam jaringan kebijakan penanganan *Stunting*. Untuk mengantisipasi ketidakberhasilan ini, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dalam pelaksanaannya melaksanakan pertemuan secara rutin.

Hasil Penelitian diperoleh diketahui bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) selalu mengadakan rapat rutin minimal 8 (delapan) kali dalam satu tahun untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu momen pertemuan ini juga sebagai ajang untuk menyampaikan informasi lain yang dianggap penting dan relevan dengan Upaya penanganan *Stunting* dari masing-masing aktor.

c) Reabilitas

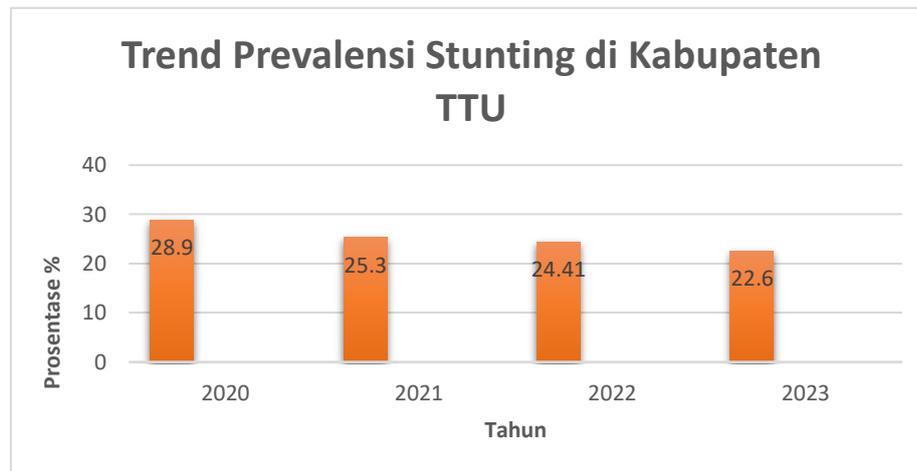
Realibilitas dalam jaringan pemerintahan diartikan sebagai pihak-pihak dalam organisasi jaringan menyepakati secara bersama-sama program yang akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan kebijakan penanganan *Stunting*. Adanya pemahaman yang sama terkait program yang akan dilaksanakan merupakan bukti bahwa setiap aktor yang terlibat dalam jaringan memiliki kesepakatan yang menjadi suatu ikatan untuk dilaksanakan secara bersama sesuai peran masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dalam Upaya Menurunkan Angka *Stunting* dilakukan melalui suatu Gerakan yang dikenal dengan Gerakan Menurunkan Angka *Stunting* (GEMAS) Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar, yakni: (1) Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), (2) Demo Memasak, (3) Pemberiaan PMT, (4) Pemeriksaan dan Pemberian Obat Cacing dan (5) Penanganan Penyakit Kronis.

Selain itu terdapat Intervensi Jangka Panjang dilakukan melalui upaya perbaikan sistem penanganan *Stunting* terintegrasi yakni Aksi Konvergensi *Stunting* yang terdiri dari 8 (Delapan) Aksi, yakni (a) Analisis Situasi, (b) Rencana Kerja, (c) Rembuk *Stunting*, (d) Penyusunan Regulasi, (e) Pembinaan KPM, (f) Manajemen Data, (g) Pengukuran dan Publikasi Data, dan (h) Monitoring dan Evaluasi.

Dalam pelaksanaannya TPPS kabupaten Timor Tengah Utara mampu berkolaborasi untuk menekan angka *Stunting* seperti tergambar pada diagram berikut.

Gambar 2. Trend Prevalensi *Stunting* di Kabupaten TTU Periode Tahun 2020-2023



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Grafik 4.1 terlihat bahwa dari kesepakatan Bersama oleh para aktor dalam percepatan penurunan angka *Stunting* di TTU berdampak positif. Ini ditandai dengan tren prevalensi *Stunting* yang cenderung menurun sejak tahun 2020 hingga tahun 2023.

Berbagi informasi (*sharing information*)

Kondisi lingkungan yang mengalami perubahan begitu kompleks dan serba tidak pasti sehingga menyebabkan organisasi sering kali gagal dalam mengimplementasikan kebijakannya atau tidak maksimal. Dalam menghadapi kondisi seperti ini mengharuskan organisasi untuk selalu bekerja sama dengan mitra lainnya sebab perubahan karakter problem sosial saat ini tidak lagi relevan jika hanya dilihat dan mengandalkan *single institution setting* dalam tahap pemecahannya. Sementara itu untuk mencapai tujuan ini perlu adanya *Sharing Information* antar organisasi, aktor-aktor lain dan sesama aktor pemerintah maupun individu yang rumit terutama dalam hal sumber daya, proses, produk, pasar, dan prakiraan pelanggan dengan aktor-aktor lain yang perlu menyelesaikan masalah.

a) Cakupan Informasi

Cakupan Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam *Sharing Information*. Cakupan informasi sangat dipengaruhi oleh referensi informasi pada setiap actor yang terlibat dalam Upaya penanganan *Stunting* di Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa cakupan informasi dari pemerintah adalah berupa laporan terkait pelaksanaan lima pilar sebagai fokus kegiatan GEMAS TTU dari masing-masing actor yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Masing-masing bidang yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) wajib memberikan informasi dalam bentuk laporan pada saat pertemuan rutin. Adapun isi laporan mencakup progres pelaksanaan aksi, kendala-kendala dalam pelaksanaan dan rencana tindak lanjut oleh masing-masing bidang. Laporan ini kemudian dievaluasi secara bersama yang melibatkan semua unsur dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Timor Tengah Utara.

Cakupan informasi yang dimiliki oleh masing-masing aktor baik Pemerintah, non pemerintah, maupun kelompok sasaran saling melakukan *Sharing information* sebab hal ini

merupakan sebuah kebutuhan dalam mencapai tujuan kebijakan dalam penanganan *Stunting*. Untuk mencapai target pemerintah dalam menekan angka *Stunting* di Kabupaten TTU melalui proses *Sharing Information*, maka perlu melibatkan masyarakat dan semua elemen dalam jumlah besar.

b) Kualitas Informasi

Kualitas informasi digunakan untuk mengukur informasi yang dihasilkan dari suatu sistem informasi dengan kualitas yang dapat memberikan nilai bagi pengguna sistem tertentu dengan karakteristik informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Budiartha, I Ketut, 2016).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek proses *Sharing Information* yang diperoleh dari pemerintah melalui dinas-dinas untuk mencapai implementasi kebijakan penanganan *Stunting* di TTU sangat baik. Ini ditandai dengan adanya bentuk-bentuk intervensi lanjutan yang dilakukan oleh GEMAS dalam mempercepat penanganan *Stunting* di TTU. Ketepatan dalam menyampaikan informasi mampu memberikan dampak positif bagi semua actor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara tepat.

Kualitas informasi dapat diukur dari aspek ketepatan, dalam arti bahwa proses penyampaian informasi harus disampaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pertukaran informasi dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dilaksanakan pada setiap kali pertemuan rutin yang dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali dalam satu tahun.

Suatu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika informasi yang dihasilkan lengkap. Informasi yang lengkap ini sangat dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang lengkap ini mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut.

Pertukaran sumber daya (*resource exchange*)

Governance network sebagai organisasi jaringan melibatkan aktor dari berbagai pemangku kepentingan, hierarkis dan tingkat organisasi yang berbeda. Grindle (Adinegoro dkk, 2025) menyatakan bahwa *resources committed* dalam konteks kebijakan harus didukung dengan kesiapan sumber daya yang mendukung dan berkualitas agar implementasi dari kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Aktor yang tergabung dan saling berinteraksi melalui jalur informasi, ketergantungan sumber daya, dan aturan kelembagaan. Pertukaran sumber daya merupakan suatu strategi yang harus dimiliki oleh organisasi dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dan ketidakpastian (*Uncertainties*). Salah satu alasan mengapa setiap organisasi melakukan strategi (pertukaran sumber daya) adalah adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor sehingga dapat mengancam tercapainya visi organisasi. Hal ini menjadikan dasar pemikiran bagi para aktor organisasi dalam mengembangkan dan beradaptasi untuk menghadapi setiap permasalahan yang kompleks dan ketidakpastian dengan terlibat dalam jaringan organisasi.

a) Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Salah satu persyaratan pertukaran sumberdaya dalam organisasi jaringan adalah sumberdaya yang akan dipertukarkan dibutuhkan oleh aktor lain sebagai penerima sumberdaya, begitu pun sebaliknya. TPPS dalam melaksanakan GEMAS untuk pencapaian tujuan melibatkan banyak actor baik pemerintah maupun swasta. Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 179/KEP/IV/2022, aktor yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Timor Tengah Utara terdiri dari berbagai kalangan.

Tabel 4. Sumber Daya Manusia dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting di TTU

No	Kordinator	Bidang	Kolaborasi Aktor
1.	Dinkes TTU	Bidang Intervensi spesifik	Dinas PMD, Direktur RSUD, Kabid Pelayanan Kesehatan, Kasi Kesga, Kasi Gizi, Kasi Pelayanan Rujukan.
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kab TTU	Bidang Intervensi Sensitif	PUPR, PRKPP, Dinsos, Dinas Peternakan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, BKAD, BPJS, IBI TTU, POKJA TP PKK.
3.	Asisten Tata Praja Setda TTU	Bidang Komunikasi, Perubahan Perilaku dan pendampingan keluarga	Deken Kefamenanu, GMTI, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) TTU, MUI TTU, NU TTU, Depag, Dians Kominfo, seksi penyuluh dan pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB
4.	Bapelitbangda TTU	Bidang Koordinasi dan Konvergensi	Dinkes, BKAD, PMD, PUPR, Dharma Wanita, Kelompok kerja bunda PAUD, IDI TTU, PAGI TTU, IAKMI, MOMENTUM USAID Timor Cluster, Save The Children, Dompot Duafa.
5.	Rektor Universitas Timor	Bidang data, monev dan manajemen Ilmu Pengetahuan	Akbid Santa Elisabeth, Kabid P2M, Kabid Pel Kesehatan, Kabid KBKS, Kabid Pengendalian Penduduk, Kasi Gizi,
6.	P2KB	Sekretariat	Sek Dinas P2KB, Sek Dinas Kesehatan, Sek Bappelitbangda, Kabid Kesmas, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, Kasubag Keuangan dan asset P2KB, Kasubag Hukum dan HAM Bappelitbangda.

Sumber: Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) TTU, diolah Peneliti 2023

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa dalam terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Timor Tengah Utara baik dari unsur pemerintahan, Swasta maupun Perguruan Tinggi. Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten timor Tengah Utara dalam Upaya penanganan *Stunting*.

b) Kecukupan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan jaringan implementasi kebijakan, pertukaran sumber daya sebagai sebuah proses yang mampu menciptakan keberhasilan aktor dalam proses implementasi kebijakan. adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh masing masing aktor menyebabkan ketergantungan sumberdaya sehingga mengharuskan para aktor untuk melakukan pertukaran (*exchange*) dengan organisasi lain untuk memperoleh *resource* yang dibutuhkan. Terjadinya Pertukaran antara aktor dalam proses implementasi kebijakan



dapat mempercepat dan menunjang tercapainya kerja sama yang lebih baik pada proses implementasi kebijakan sehingga proses pencapaian tujuan lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sumber daya yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) sudah sangat mencukupi. Keterlibatan multi actor dalam penanganan *Stunting* menjadi bukti bahwa masing-masing actor memiliki tanggungjawab sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kecukupan sumber daya ini juga dapat dilihat dari adanya kolaborasi actor yang berdampak pada keberhasilan tim dalam menurunkan angka *Stunting* di Kabupaten Timor Tengah Utara.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan perhatian yang cukup besar dalam upaya menurunkan angka *Stunting* yang tergambar melalui adanya kolaborasi lintas sektor baik unsur pemerintah, swasta serta akademisi. Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; Pada Aspek Kontak (*Contact*), actor yang terlibat dalam Tim Percepatan Penanganan *Stunting* memiliki ikatan sosial dan keeratan dari masing-masing pihak dalam organisasi jaringan. Hal ini dapat terlihat melalui kontribusi yang diberikan baik oleh pemerintah, pihak swasta maupun akademisi berdasarkan perannya masing-masing. Selain itu Jaringan ini juga rutin melaksanakan pertemuan untuk berbagi informasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Aspek Kepercayaan (*Trust*); mempunyai pengaruh yang positif untuk meningkatkan kerjasama dalam organisasi jaringan, sehingga para aktor baik aktor individu maupun aktor dalam kelompok tidak melakukan penyimpangan pada kontrak yang telah disepakati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa actor yang terlibat dalam jaringan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) mampu memberikan jaminan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peran masing-masing sehingga menumbuhkan rasa percaya antar actor yang terlibat. Berbagi Informasi (*Sharing Information*), aspek ini menekankan pada pentingnya proses pertukaran informasi terutama dalam hal sumber daya, proses, produk, dengan aktor-aktor lain yang terlibat dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa actor yang terlibat dalam jaringan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) wajib memberikan informasi dalam bentuk laporan pada saat pertemuan rutin. Adapun isi laporan mencakup progres pelaksanaan aksi, kendala-kelndala dalam pelaksanaan dan rencana tindak lanjut oleh masing-masing bidang. Laporan ini kemudian dievaluasi secara bersama yang melibatkan semua unsur dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Timor Tengah Utara. Sementara pada aspek Pertukaran Sumber Daya (*Resource Exchange*) terlaksana dengan mengacu pada Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 179/KEP/IV/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana dalam Keputusan tersebut mengatur secara spesifik aktor (sumber daya) yang terlibat terdiri dari berbagai kalangan baik dari unsur pemerintah, swasta maupun akademisi dengan peran dan kontribusinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro. Ruhputy, Pambudi, Arrahman, 2025. *Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan dan Informasi Publik*. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16, No. 1 (Januari 2025) Hal. 1-11. DOI: <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869>.
- Ahmad Saufi. 2021. *Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19*. Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

- Almasyah, Prastiwi, Salamah. 2021. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 12, No. 2 (Juni 2021) Hal. 107-121. DOI: <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.3755>.
- Alwi, 2018. *Kolaborasi dan kinerja kebijakan (Tantangan dan strategi dalam penentuan dan implementasi kebijakan)*: Kedai buku Jenny. Yogyakarta.
- Asweros Umbu Zogara, Maria Goreti Pantaleon. 2020. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita*. MG / *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Vol. 9, No. 2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.33221/jikm.v9i02.505>
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. 2021. Penurunan Prevalensi *Stunting* tahun 2021 sebagai Modal Menuju Generasi Emas Indonesia 2045. <https://www.kemkes.go.id/article/view/21122800001/penurunan-prevalensi-Stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045.html>. Diakses 11 Januari 2023
- Ipan, Hanny Purnamasari, Evi Priyanti. 2021. *Collaborative governance dalam penanganan Stunting*. *Kinerja*. Vol. 18, No. 3, Hal. 383-391. (September 2021). DOI:10.29264/jkin.v18i3.9665
- Kusnandar. 2022. 10 Provinsi dengan Angka *Stunting* Tertinggi Nasional Tahun 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/12/10-provinsi-dengan-angka-Stunting-tertinggi-nasional-tahun-2021>. Diakses 1 Januari 2023.
- Lewokeda. 2022. Dinkes NTT fokus penanganan *Stunting* 19.291 anak baduta. <https://kupang.antaranews.com/berita/101753/dinkes-ntt-fokus-penanganan-Stunting-19291-anakbaduta#:~:text=Ia%20menjelaskan%20jumlah%20kasus%20Stunting,tahun%20sebanyak%2019.291%20orang%20anak>. Diakses 3 Januari 2023.
- Mariane, Palls, Ariesmansyah. 2022. Model *Policy Network* dalam menunjang implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Kuningan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 13, No. 2 (Juni, 2022) Hal. 171-180. DOI: <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5581>
- Marutho Bere. 2022. Angka *Stunting* di NTT Tinggi, 15 Kabupaten Masuk Kategori Merah. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/03/215319778/angka-Stunting-di-ntt-tinggi-15-kabupaten-masuk-kategori-merah?page=all>. Diakses 01 Januari 2023.
- Rahayu. 2018. *Study guide–Stunting dan upaya Pencegahannya*. CV. Mine. Yogyakarta
- Rukmana S, N. S. (2020). *Analisis Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)
- Sadhana. 2011. *Realitas Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Malang. Malang
- Saputri, Tumangger. 2019. *Hulu-hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia*. *Journal of Political Issues*. Vol. 1, No. 1. (Juli 2019). Hal. 1-9. DOI: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- Saputri. 2019. *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. *Jurnal Dinamika Pemerintahan* Vol.2, No. 2. (Agustus 2019) Hal. 152-168. DOI: <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.947>

- Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. 2012. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Woso. 2022. *Ini Sebaran Stunting di Nusa Tenggara Timur Hingga 2022*.
<https://kupang.tribunnews.com/2022/03/04/ini-sebaran-Stunting-di-nusa-tenggara-timur-hingga-tahun-2022>. Diakses 2 Januari 2023.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 *Tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
- Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 179/KEP/IV/2022 *Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara*.